

INSPEKTORAT AUDIT TEMUAN PANSUS SOAL ANGGARAN MILIARAN DI BPBD SULTRA



Sumber gambar:

<https://penafaktual.com/inspektorat-audit-temuan-pansus-soal-anggaran-miliaran-di-bpbd-sultra/>

Isi Berita:

KENDARI – Temuan dugaan penyalahgunaan anggaran di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Tenggara (Sultra) tengah di audit Inspektorat Sultra. Audit yang dilakukan Inspektorat Sultra berdasarkan kesimpulan DPRD Sultra lewat Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk untuk menyikapi temuan pada laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sultra.

Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Sultra, Intan Nur Cahaya, membenarkan bahwa hasil Pansus DPRD sudah diserahkan ke Inspektorat untuk kemudian dilakukan pemeriksaan terkait temuan penyalahgunaan anggaran BPBD Sultra.

“Ditindaklanjuti dengan audit,” singkat dia saat dihubungi awak media ini, Kamis, 12 Juli 2024.

Saat ditanya soal jumlah kerugian temuan BPK, Intan Nur Cahaya enggan untuk berkomentar lebih banyak lagi mengenai temuan yang sementara dalam proses audit.

Sebelumnya diberitakan, Pansus DPRD Sultra temukan adanya dugaan penyelewengan anggaran dari total Rp3 miliar anggaran yang digelontorkan APBD untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sultra pada tahun 2023.

“Dalam pembahasan pansus (sudah selesai) itu maka kemudian kita temukan lah tentang beberapa catatan dari LHP BPK RI, termasuk BPBD Sultra yang ada beberapa temuan itu,” kata dia kepada awak media ini, Selasa, 9 Juli 2024.

Meski begitu, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Sultra ini tidak merincikan terkait temuan penyalahgunaan anggaran di BPBD Sultra.

Namun yang jelas, kata Suwandi Andi, temuan pansus berdasarkan LHP BPK, terindikasi dugaan penyalahgunaan anggaran tersebut, negara mengalami kerugian hingga miliar rupiah.

“Kerja kami pansus sudah selesai dan pertanggungjawaban kami sudah selesai. Nah, sekarang kita sudah limpahkan, serahkan ke Inspektorat sebagai liding sektor pemeriksaan LHP BPK untuk kemudian menindaklanjuti,” katanya.

Mengenai tidaklanjut dari temuan pansus DPRD Sultra, Suwandi Andi menambahkan bahwa, tergantung Inspektorat Sultra untuk bagaimana menyelesaikan masalah penyelewengan anggaran ditubuh BPBD Sultra.

“Apakah setelah di fasilitasi oleh Inspektorat, dia minta pengembalian kerugian negara, atau seperti apa, saya kira ada jalurnya,” tukasnya.(hsn).

Sumber Berita:

1. <https://penafaktual.com/inspektorat-audit-temuan-pansus-soal-anggaran-miliaran-di-bpbd-sultra/>, “Inaspektorat Audit Temuan Pansus Soal Anggaran Miliaran di BPBD Sultra”, tanggal 12 Juli 2024
2. <https://detiksultra.com/kendari/pansus-temukan-kerugian-negara-hingga-miliran-rupiah-di-bpbd-sultra/>, “Pansus Temukan Kerugian Negara Hingga Miliaran Rupiah di BPBD Sultra”, tanggal 10 Juli 2024
3. <https://kendariinfo.com/pansus-dprd-temukan-kerugian-keuangan-negara-miliaran-rupiah-di-bpbd-sultra-inspektorat-lakukan-audit/>, “Pansus DPRD Temukan Kerugian Keuangan Negara Miliaran Rupiah di BPBD Sultra, Inspektorat Lakukan Audit”, tanggal 12 Juli 2024
4. <https://www.halosultra.com/sultra-rama/37607/pansus-dprd-bahas-dugaan-kerugian-negara-di-bpbd-sultra-senilai-rp-3-miliar/>, “Pansus DPRD Bahas Dugaan Kerugian Negara di BPBD Sultra Senilai Rp 3 Miliar”, tanggal 10 Juli 2024
5. <https://tenggaranews.com/bpk-temukan-dugaan-kerugian-negara-rp-3-m-di-bpbd-dprd-sultra-langsung-bentuk-pansus/>, “BPK Temukan Dugaan Kerugian Negara Rp 3 M di BPBD, DPRD Sultra Langsung Bentuk Pansus”, tanggal 11 Juli 2024.
6. <https://www.teropongsultra.com/hukum-kriminal/inspektorat-lakukan-pemeriksaan-dugaan-penyalahgunaan-anggaran-miliaran-rupiah-di-bpbd-sultra/>, “Inspektorat Lakukan Pemeriksaan Dugaan Penyalahgunaan anggaran Miliaran Rupiah di BPBD Sultra”, tanggal 12 Juli 2024
7. <https://www.kiatindonesia.com/nasional/37213099737/pansus-dprd-sultra-berakhir-temukan-dugaan-kerugian-negara-sebesar-3-miliar-di-bpbd>, “Pansus DPRD Sultra Berakhir, Temukan Dugaan Kerugian Negara Sebesar 3 Miliar di BPBD” tanggal 10 Juli 2024.

Catatan:

- Audit Inspektorat Sultra atas dugaan penyalahgunaan anggaran di BPBD Sultra adalah langkah positif untuk menindaklanjuti temuan Pansus DPRD. Proses ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik.
- Terkait Audit Inspektorat Sultra diatur dalam:
 - a. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 - 1) Pasal 1 menyatakan bahwa Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) diubah sebagai berikut: Angka 1 Ketentuan ayat (5) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 11 ayat (5) Inspektorat Daerah provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi Pengawasan; b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur dan/atau Menteri; d. penyusunan laporan hasil pengawasan; e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi; f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; g. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah provinsi; dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.